

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Untuk membantu pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori untuk membantu proses penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya :

##### **1. Revitalisasi Pertanian**

Revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk:

- a. Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan.
- b. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun delivery system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
- c. Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian.

Kebijakan yang ada dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- a. Mempertahankan tingkat produksi beras dalam negeri dengan ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik, agar kemandirian pangan nasional dapat diamankan.
- b. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
- c. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan, untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi:

- a. Pengembangan diversifikasi usahatani, melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan *off-farm* untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah;
- b. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindustri di perdesaan;

- c. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani, serta infrastruktur perdesaan lainnya;
- d. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, dan permodalan;
- e. Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil;
- f. Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan; dan
- g. Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian (htt).<sup>1</sup>

## 2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu, kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, tidak jarang kebijakan publik bersifat tertutup. Dalam arti , kebijakan tersebut dalam konteks politik tidak demokratik sehingga keputusan bersifat *top down*. Tidak begitu saja aktor pembuatan kebijakan publik membuat keputusan sangat sempit guna

---

<sup>1</sup> Diakses melalui : <http://hukum.unsrat.ac.id>>pres

mempresentasikan golongan tertentu. Dengan seperti itu maka pembuatan kebijakan publik tidak untuk Publik namun untuk kepentingan segelintir orang saja (Agustino, 2017).<sup>2</sup>

Dilihat dari kajian ilmiah kebijakan publik, menurut Anderson (1990), Dye (1992), juga Moran, Rein & Goodin (2006), dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai “proses kebijakan”. Apa yang dimaksud dengan proses kebijakan ? Proses kebijakan adalah serangkaian alur yang perlu dilalui untuk memahami gejala atau fenomena yang perlu diselesaikan oleh sebuah atau lebih kebijakan publik. Dalam arti kata lain, proses kebijakan meliputi asal atau akar masalah, proses menyelesaikan masalah, perkembangan setelah disikapi dan akibat yang dtimbulkan oleh masalah bagi masyarakat. Alur ini pada umumnya meningkatkan pemahaman kita mengenai struktur masalah yang sejati. Ia juga meliputi penemuan atas kejanggalan sistem politik, sistem sosial ataupun sistem budaya yang amat mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman (Agustino, 2017).<sup>3</sup>

Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang baik sebagai variabel dependen maupun variable independen. Dikatakan sebagai variabel dependen manakala perhatian kebijakan tertuju pada faktor politik dan lingkungannya yang mempengaruhi atau menentukan konten kebijakan. Sedangkan kebijakan public dipandang sebagai variable independen ketika kebijakan berdampak terhadap sistem politik dan lingkungan sekitarnya (Agustino, 2017).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Edisi Revisi Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Leo Agustino, Ph.D (Hal: 1)

<sup>3</sup> *Edisi Revisi Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Leo Agustino, Ph.D (Hal: 3)

<sup>4</sup> *Edisi Revisi Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Leo Agustino, Ph.D (Hal: 3)

Menurut Frederickson (1997) ada beberapa prinsip yang dapat diakomodasikan tentang bagaimana konsep publik dapat diperkuat eksistensinya, baik sebagai ide maupun sebagai suatu seni dalam praktiknya. Terdapat beberapa prinsip diantaranya yaitu :

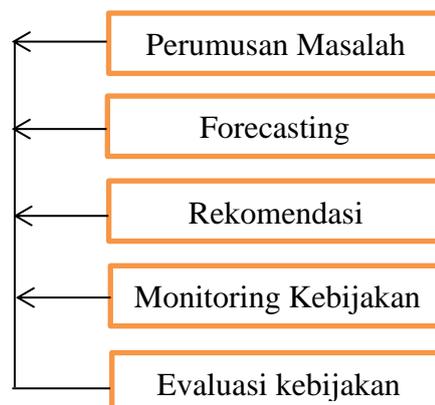
- a. Prinsip pertama, konsep publik harus dibangun melalui pemberdayaan konstitusi. Setiap tindakan pejabat harus bersifat konstitusi artinya administrator publik harus mempunyai kompetensi, baik secara teknis maupun secara manajeral, untuk mengabdikan pada masyarakat yang berbasis pada ketetapan konstitusi.
- b. Prinsip kedua, konsep publik harus berdasarkan pada pengertian tentang warga Negara yang berbudi luhur. Dalam hal ini perlu disadari bahwa suatu rezim pemerintahan tidak akan lebih baik dari masyarakatnya yang mereka wakili.
- c. Prinsip ketiga, konsep publik harus didasarkan pada pembentukan dan usaha mempertahankan sistem dan prosedur untuk mendengar dan merespon kepentingan publik.
- d. Prinsip keempat, konsep publik harus didasarkan pada kebijakan dan kasih. Jika benar bahwa tujuan pemerintah adalah memperluas perlindungan nilai-nilai rejim kepada seluruh warga Negara, maka administratif publik harus memiliki suatu konsep tentang publik yang didasarkan pada kebijakan dan kasih sayang (Agustino, 2017).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Edisi Revisi *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Leo Agustino, Ph.D (Hal: 13-14)

Maka dari itu kebijakan publik dapat disimpulkan, menurut Laswell dalam kajian klasik (1956:4) menyatakan kebijakan publik sebagai: “ ... *a project program of goals, values, and practices*”. Manakala Easton (1965:212) memaknai sebagai : “.... *The impact of government activity*”. Leih lanjut Easton menjelaskan, kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah “... *para birokrat senior (eksekutif), legislative, para hakim dan sebagainya*”. (Easton 1965:214). Dari kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang mempunyai tujuan, memiliki nilai tertentu dan memberikan dampak (positif) bagi masyarakat luas (Agustino, 2017).<sup>6</sup> Dalam membuat Kebijakan Publik Terhadap Beberapa Tahapan Yang Dapat digunakan sebagai proses kebijakan publik. Menurut, William N. Dunn, 1994:17, yaitu (Subarsono, 2013):<sup>7</sup>

**(Gambar 1.1 Tahapan Kebijakan Publik)**



<sup>6</sup> Edisi Revisi *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Leo Agustino, Ph.D (Hal: 15-16)

<sup>7</sup> *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA (Hal: 9-10)

**Tabel 1.1 Tahap Analisis Kebijakan**

<b>Tahapan</b>	<b>Karakteristik</b>
<b>Perumusan Masalah</b>	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
<b>Forecasting (Peramalan)</b>	Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternative kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari siat alternative dan merekomendasikan alternative kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi
<b>Monitoring Kebijakan</b>	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
<b>Evaluasi Kebijakan</b>	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

**Tabel 1.2 Kerangka Analisis Kebijakan**

Fokus	Paramenter		
	Penelitian atau Rasionalisasi	Nilai-nilai	Politik
Definis Kebijakan Sosial Apa masalah sosialnya ?	Apakah definisi masalah rasional dan konsisten dengan penelitian	Apakah ini merupakan sosial yang penting ? Nilai-nilai apa yang	Apakah definisi secara politik dapat diterima ? Individu ataau

<p>Faktor apa yang mempengaruhi masalah tersebut</p> <p>Siapa yang terpengaruh secara langsung oleh masalah tersebut</p>	<p>yang ada?</p> <p>Apakah definisi kelompok sasaran pada tingkat generalisasi tertentu sudah sesuai dengan penelitian ?</p> <p>Apakah kriteria yang digunakan untuk menyeleksi kelompok sasaran didukung oleh rasionalisasi dan penelitian ?</p> <p>Apakah penelitian yang ada mendukung penyebab masalah ?</p>	<p>penting dalam melakukan seleksi kelompok sasaran ?</p> <p>Apakah nilai-nilai tersebut sudah tepat ?</p> <p>Nilai-nilai apa yang penting dalam menentukan penyebab masalah?</p> <p>Apakah nilai-nilai tersebut sudah tepat ?</p>	<p>kelompok mana yang mendukung dan menentang pendefinisian kelompok sasaran?</p> <p>Apa akibat terhadap pendefinisian masalah sosial ?</p> <p>Apa akibat penentuan masalah tersebut terhadap individu atau kelompok sasaran ?</p>
<p>Implementasi Kebijakan Sosial</p> <p>Apa tujuan kebijakan sosial ?</p> <p>Program dan layanan sosial apa yang diberikan ?</p> <p>Bagaimana kebijakan tersebut didanai ?</p>	<p>Apakah tujuan kebijakan konsisten dengan penelitian dan pendefinisian masalah ?</p> <p>Apa bentuk pelayanan sosial yang diberikan ?</p> <p>Apakah penelitian mendukung</p>	<p>Nilai-nilai yang mempengaruhi tujuan kebijakan ?</p> <p>Apakah nilai-nilai tersebut sudah tepat ?</p> <p>Apakah kebijakan memerlukan klien secara tepat sesuai dengan kesamaan,</p>	<p>Seberapa besar tingkat kekuasaan yang menentang kebijakan ?</p> <p>Bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan ?</p> <p>Adakah dukungan yang memadai yang dapat</p>

	<p>pelayanan sosial yang dipilih ?</p> <p>Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan kebijakannya ?</p> <p>Apakah pendanaan memadai, teramalkan dan tersedia sesuai dengan penelitian dan rasionalisasi ?</p>	<p>kesetaraan, kelayakan dan penentuan nasib sendiri klien ?</p> <p>Apakah struktur organisasi mendukung efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan ?</p> <p>Apakah pendanaan memadai, teramalkan dan tersedia sejalan dengan nilai ?</p>	<p>memungkinkan kebijakan diterapkan ?</p> <p>Individu dan kelompok mana yang akan diuntungkan oleh kebijakan ini ?</p> <p>Apakah dampaknya bagi Implementasi Kebijakan ?</p> <p>Apakah pendanaan memadai, teramalkan dan tersedia sejalan dengan politik ?</p>
<p>Konsekuensi Kebijakan Sosial</p> <p>Apa keuntungan dan kerugian kebijakan ?</p> <p>Apa konsekuensi, kebijakan bagi klien, sistem social dan sistem pelayanan sosial ?</p>	<p>Apakah keuntungan dan kerugian dengan penelitian rasionalisasi ?</p> <p>Apa konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan dari kebijakan dalam kaitannya dengan penelitian dan rasionalisasi ?</p>	<p>Apakah keuntungan dan kerugian sejalan dengan nilai-nilai ?</p> <p>Apa konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan dari kebijakan dalam kaitannya dengan nilai ?</p>	<p>Apakah keuntungan dan kerugian sejalan dengan politik ?</p> <p>Bagaimana dukungan dan penentang terhadap kebijakan pada tingkat masyarakat mempengaruhi pemberiaan pelayanan ?</p>

### 3. Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menuju pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Dunn, 2003).<sup>8</sup> Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup lama. Agar *outcome* yang dihasilkan dapat maksimal (Subarsono, 2013).<sup>9</sup> Evaluasi memiliki tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur beberapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada lebih lanjut evaluasi ini memberikan dampak lebih lanjut baik dampak positif ataupun dampak negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan, dengan membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

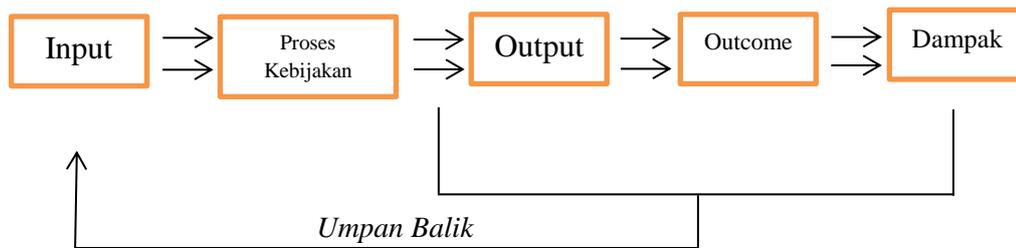
---

<sup>8</sup> *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua, William N. Dunn* (Hal: 608)

<sup>9</sup> *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA* (Hal: 119)

Tujuan akhir dari evaluasi yaitu memberikan proses kebijakan untuk kebijakan selanjutnya. Seperti halnya (Subarsono, 2013):<sup>10</sup>

(Gambar 1.2 Kebijakan Sebagai Suatu Proses)



Penjelasan :

- Yang dimaksud dengan *input* adalah bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, tuntutan-tuntutan dan dukungan masyarakat.
- Sistem politik melalui para aktornya melakukan *proses* konversi dari input menjadi output. Selama proses tersebut terjadi bargaining dan negosiasi antar para actor yang membuat kebijakan.
- Output* adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa dan program.
- Outcome*, adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu akibat diimplementasikan suatu kebijakan.
- Sedangkan yang terakhir *impact* (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan oleh

---

<sup>10</sup> Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA (Hal: 121)

pemerintah. Ada beberapa hal yang penting ketika melakukan evaluasi kebijakan diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan.
- b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik.
- d. Menunjukkan pada *stakeholders*, manfaat suatu kebijakan.
- e. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama (Subarsono, 2013).<sup>11</sup>

Karena suatu kebijakan perlu dikembangkan karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari sesungguhnya. Menurut Dunn (1994) terdapat indikator dalam evaluasi diantaranya (Subarsono, 2013):<sup>12</sup>

**(Tabel 1.3 Evaluasi Kebijakan)**

<b>Kriteria</b>	<b>Penjelasan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah ?
Pemertaan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda ?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka ?
Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

<sup>11</sup> Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA (Hal: 121-123)

<sup>12</sup> Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA (Hal: 126)

#### 4. Negara Kesejahteraan

Negara menurut Prof. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa pengertian atau definisi Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan (kontrol) monopolitisi dari kekuasaan yang sah (Budiardjo, 2015).<sup>13</sup>

Negara kesejahteraan atau welfare state memiliki arti yang berbeda bagi semua orang. Oleh karenanya, Titmuss memberikan pengertian yang lebih terbuka pada kesejahteraan. Beliau menyarankan kriteria kesejahteraan sebagai

“suatu masyarakat yang secara terbuka menerima tanggung jawab kebijakan untuk mendidkan melatih warga negaranya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga dokter, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, insinyur dan sebagainya”.

Saran ini disamping agar Negara-negara yang lebih miskin tidak kehabisan tenaga-tenaga ahli yang sangat diperlukan untuk pembangunan Negara tersebut (Fahrudin, 2018).<sup>14</sup>

“Midgley (1997) mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan atau welfare state digunakan untuk menyatakan suatu Negara yang pemerintahnya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya. Konsep ini menyatakan hal yang ideal untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ditemui di suatu Negara tertentu. Jadi suatu Negara dapat dinilai berdasarkan seberapa banyak pelayanan-pelayanan sosial disediakan untuk warganya”.

Negara kesejahteraan merupakan proyeksi sosialis demokratis yang dihasilkan oleh pejuang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil.

---

<sup>13</sup> *Edisi Revisi dasar-Dasar Ilmu Politik*, Prof Miriam Budiardjo (Hal: 48)

<sup>14</sup> *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Prof. Adi Fahrudin. Ph.D (Hal: 103)

Negara kesejahteraan hanyalah sedikit melebihi usaha untuk mengurangi akses-akses yang lebih buruk dari kapitalisme. Mereka mengatakan bahwa Negara kesejahteraan sedikitpun bukan merupakan Negara sosialis. Konsep Negara kesejahteraan masih banyak digunakan dalam kalangan kesejahteraan sosial dan kebijakan sosial (*social policy*). Beberapa penulis masih percaya dengan konsep tersebut dalam kaitannya pelayanan-pelayanan sosial pemerintah namun juga harus di iringi pemberian pelayanan-pelayanan organisasi nirlaba dan kormesial. Namun lebih mengarah kepada Negara Sosial (dalam Midley, 1997) (Fahrudin, 2018).<sup>15</sup>

Namun ada beberapa penulis mengatakan bahwa Negara Kesejahteraan bukanlah Negara sosialis ataupun Negara kapitalis. Namun Negara kesejahteraan kolaborasi pembentukan yang unik dalam pengertian ;

“konsensus kesejahteraan atau kompromi demokratis sosial. Bagi beberapa penulis, Negara kesejahteraan menunjukkan akomodasi historis antara kapitalisme dan sosialisme”.

Adapun beberapa tipologi dalam Negara kesejahteraan salah satunya menurut Richard Titmuss, seorang kebijakan sosial Inggris, membedakan pelayanan sosial secara universal dan secara kolektif. Model universal-selektif sesuai dengan model yang dikemukakan oleh Wilensky dan Lebeaux yang menggunakan istilah residual dan institusional. Titmuss melihat golongan ini tidak mencakup beberapa wilayah di Negara Eropa, seperti halnya Jerman dan Uni Soviet (ketika itu) yang dimana ketika itu tolak ukur menggunakan catatan kerja seorang untuk menerima

---

<sup>15</sup> *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Prof. Adi Fahrudin. Ph.D (Hal: 104-105)

pelayanan-pelayanan kesejahteraan yang diberikan Negara kepada masyarakatnya.

Maka dari itu Titmuss menambah satu model dalam Negara kesejahteraan yaitu :

- a. Model kesejahteraan residul.
- b. Model kesejahteraan kinerja-pencapaian industrial.
- c. Model redistributive institusional (Titmus, 1974).

Menurut Esping-Andersen (1990) mengatakan bahwa dekomodifikasi tenaga kerja merupakan kriteria yang digunakan sejauh mana pemerintah suatu Negara melakukan intervensi untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Dalam salah satu studinya, Andersen mengungkapkan bahwa *welfare state* merupakan institusi Negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditunjukkan untuk :

- Memastikan setiap warga Negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standart kelayakan.
- Memberikan layanan social bagi setiap permasalahan yang dialami warga Negara (baik dikarenakan sakit, tua atau menganggr) serta kondisi lain semisal krisis ekonomi.
- Memastikan setiap warga Negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi dan perbedaan lain.

“Norman Furniss dan Timothy Tilton (1977), membuat penggolongan yang terdiri atas tiga golongan. Model mereka meliputi positif state, Negara jaminan sosial dan Negara kesejahteraan sosial. Negara Positif dengan contoh

Amerika Serikat, berfungsi untuk menjamin stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan pemilik tanah dan bangunan. Negara jaminan sosial, dengan contoh Inggris, berfungsi untuk menjamin standar kesejahteraan minimum bagi warga Negeranya. Sedangkan Negara Kesejahteraan sosial, seperti Swedia melampaui kepentingan sekedar untuk untuk mencapai standar minimum saja, dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga Negara dengan tidak hanya memberikan serangkaian pelayanan sosial komprehensif tetapi dengan menjaga persamaan dan partisipasi dalam urusan politik”.<sup>16</sup>

## 5. Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dideskripsikan pada *jantunan* dalang dalam adegan pertama yang dikonsepsikan sebagai kondisi *tata tentram kerta reharja* yang artinya mengandung unsur atau komponen, ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman dan kemakmuran. Konsep *tentrem* lebih menggambarkan dimensi sosiologis dan psikologis dalam kehidupan masyarakat. Suatu kehidupan yang merasa suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termasuk hari esok.

Sementara komponen kemakmuran lebih bernuasa ekonomik yang dapat diartikan dari kerta raharja, bukan saja melambangkan ke levelan kehidupan, melainkan dinamika dan iklim yang mendukung. Sedangkan konsep *kerta* menggambarkan aktifitas dan dinamika yang didukung oleh etos, iklim kondusif dan terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri. Maka semua itu akan menghasilkan kehidupan *raharja* yang mencerminkan kemakmuran.

---

<sup>16</sup> *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Prof. Adi Fahrudin. Ph.D (Hal: 108)

Kondisi kesejahteraan yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang memenuhi kebutuhan fisik, material, melainkan juga spiritual dan bukan pula kebutuhan jasminiah melainkan pula kebutuhan rohaniah. Dalam konstruksi masyarakat lokal dalam pengembangan konsep Negara kesejahteraan dalam ukuran normatif atau objektif sebagai suatu landasan kebijakan Negara, maka perlu dibandingkan keduanya, ukuran objektif-normatif dalam konstruksi Negara dan ukuran relative-subjektif dalam konstruksi yang ada di masyarakat lokal.

Kesejahteraan normative yang digagas Negara dapat dikemukakan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IklaR) yang dikembangkan oleh Kesra. Konsep IkraR mengandung 3 konsep yaitu Keadilan Sosial, Keadilan Ekonomi dan Demokrasi.

“keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: akses pada listrik, rata-rata lama sekolah, akses pada kesehatan, rekreasi-olahraga-seni, jaminan social, penduduk yang mencapai usia 40 tahun, akses pada air bersih, akses pada sanitasi, jumlah penduduk miskin, tingkat kesenjangan. Komponen keadilan ekonomi berisi indikator rasio PAD terhadap APBD, ketersediaan dan akses pada bank, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, penduduk yang memiliki rumah, perbandingan pengeluaran penduduk dengan garis kemiskinan, tingkat pengeluaran penduduk dengan garis kemiskinan, tingkat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, tingkat pengeluaran untuk kesehatan. Sementara itu, komponen deokrasi diukur dari indikator rasa aman, akses informasi, kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga demokrasi.”

Komponen IkraR masih menggambarkan konsep sosial dalam aspek pembangunan, tidak termasuk kedalam konstruksi masyarakat lokal. Karena dalam komponen IkraR tidak ada aspek *tentram* yang dimana, aspek tersebut merupakan gambaran unsur terpenting dalam tingkat kesejahteraan yang masyarakat inginkan. Secara sederhana konsep sejahtera dapat dilihat melihat dalam kondisi semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhinya. Berdasarkan perspektif

tersebut, maka konsep kesejahteraan yang digagas Negara merupakan landasan serta tolak ukur kebijakan dengan kesejahteraan dalam konstruksi masyarakat lokal menunjukkan adanya kebutuhan normatif dengan kebutuhan yang dirasakan. Hal tersebut dapat melihat bahwa makmur secara ekonomi belum tentu merasakan tentram.

Konsep *social inclusion* merupakan masyarakat merasa tentram berada didalamnya. Karena masyarakat dapat diakui oleh sistem sosial masyarakatnya. Dengan demikian masyarakatnya tidak ada hambatan untuk mengikuti proses sosial yang ada di dalamnya termasuk untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta dapat mengakses pelayanan-pelayanan publik yang ada. Sedangkan *social exclusion* melihat kondisi masyarakat teralienasi dalam kehidupan sosialnya, memperoleh hambatan dalam partisipasi dan pemenuhan hak-haknya (Hall dan Midley, 2004:10). Dalam hal tersebut masyarakat memiliki hambatan dalam mengakses sumber daya yang ada.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya abahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal/skripsi terkait dengan penelitian penulis.

1. Siti Aminah Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menulis dalam bentuk Skripsi pada tahun 2017 dengan judul “Negara dan Kesejahteraan (Analisis Ekonomi Politik Terhadap Hubungan Petani Dengan PT. Surya Lestari II di Desa Waiputeh Kabupaten Mamuju Tengah”. Adapun isi skripsi mengkaji, bagaimana hubungan Petani dengan PT. Surya Lestari II yang menghasilkan penelitian tersebut menunjuk bahwa relasi social antara petani sawit dengan PT. Surya Lestari II awalnya saling membutuhkan, petani memberikan tanah mereka kepada perusahaan untuk dikelola sedangkan perusahaan membutuhkan tanah petani untuk peningkatkan produksi. Tetapi dalam perkembangannya hubungan kerjasama tersebut, menimbulkan masalah yaitu tingginya standart tandan buah segar (TBS) yang ditetapkan oleh PT. Surya Lestari II buah dihargai melalui mutu dan kualitas buah saat tiba dipabrik. Melihat hal ini pemerintah segera bertindak untuk memastikan adanya masalah terhadap petani tentang tandan buah segar (TBS) dan memang benar ada keliruan dengan penerimaan harga TBS serta membentuk aturan kelayakan lahan untuk dikonversi. *Sedangkan* yang menjadi perbedaan dengan peneliti ini yaitu kepada letak subjek (pemerintah) dan objek terletak pada Petani gabah/beras.
2. Siti Nurrohmah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari menulis dalam berbentuk skripsi pada tahun 2016, yang berjudul “Analisis Produksi dan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan” adapun isi skripsinya

mengkaji tentang hasil penerimaan dan penjualan dari petani dan beberapa proses pengelolaan lahan pertanian. Penjualan beras/gabah tidak sesuai dengan pengeluaran terhadap pengelolaan lahan di Desa Wuura, hal tersebut akan menimbulkan ketidak seimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Adapun kesamaan dalam penelitian ini terdapat pada para petani gabah/beras yang akan diteliti. Serta untuk membedakanya penelitian ini akan menghasikan output hasil kesejahteraan bagi petani gabah/beras.

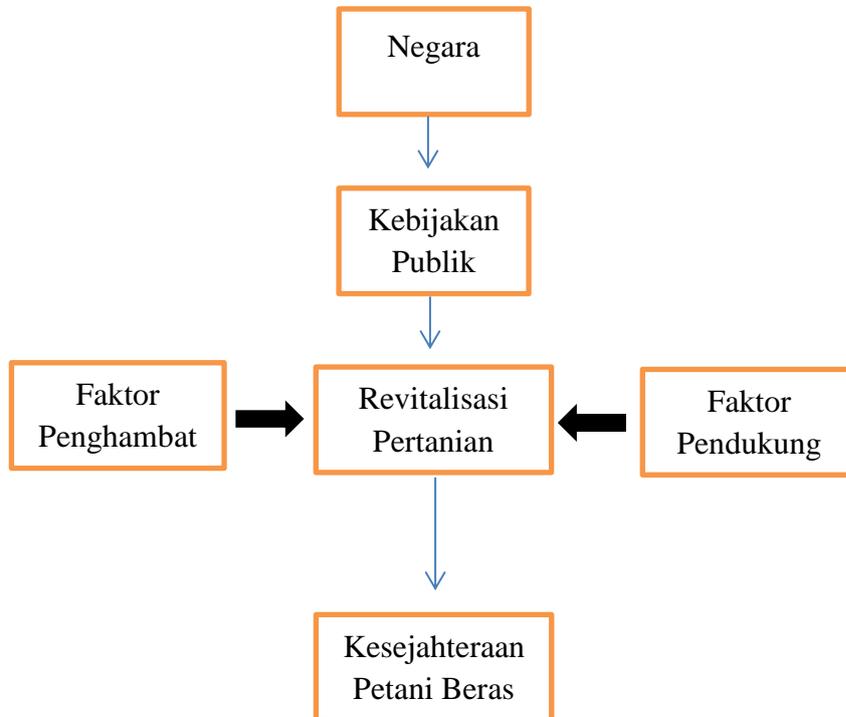
3. Nasri Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menulis dalam bentuk Skripsi pada tahun 2013 dengan judul “Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulujangang Kec. Bontolempangan Kab. Gowa”. Adapun isi skripsinya mengkaji, kondisi kesejahteraan masyarakat di desa Ulujangang dalam keadaan sejahtera dengan terdapat pembinaan masyarakat dalam bidang pertanian, keagamaan dan pendidikan kemajuan desa Ulujangang. Seleruh kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat terdapat pada kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kesamaan dalam penelitian ini terdapat pada meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat tani dikelompok masyarakat, namun untuk menjadi pembeda dalam peneliti ini yaitu tidaknya adanya peran pemerintah yang ikut serta dalam proses mensejahterakan masyarakat dan hal ini yang akan menjadi pembeda hasil dari penelitian ini.
4. Mamur Rizki Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menulis

dalam bentuk Skripsi pada tahun 2017 dengan judul “Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945” adapun isi skripsinya mengkaji tentang para pendiri bangsa dalam cita-citanya mensejahterakan rakyat memilih bentuk Negara kesejahteraan sebagai pilihan yang dianggap tepat untuk kondisi Negara Indonesia. Prinsip Negara kesejahteraan itu kemudian tertuang dalam UUD 1945. Prinsip dalam UUD 1945 mengakomodir ketiga konsep rezim kesejahteraan. Konsep residual welfare state tertuang dalam pasal 34 ayat 1. Kesamaan dalam penelitian ini terdapat di konsep kesejahteraan bagi masyarakat. Namun perbedaan penelitian ini terdapat pada peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

### **C. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran umum terhadap penelitian sebagai berikut :

*(Gambar 1.3 Kerangka Konseptual)*



Penjelasan :

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki SDM yang melimpah. Dalam mengelola SDM yang ada di Indonesia, tentu saja pemerintah membuat berbagai Kebijakan Publik untuk mengatur, mengelola SDM yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah program Revitalisasi Pertanian. Dalam menjalankan revitalisasi pertanian tersebut tentu banyak faktor penghambat dan faktor pendukung dalam program revitalisasi pertanian. Akhir dari sebuah kebijakan revitalisasi pertanian tersebut yaitu berupa Kesejahteraan Petani Beras untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

